

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI REHABILITASI SEBAGAI ALTERNATIF PEMIDANAAN BAGI PENGGUNA NARKOBA ( Studi Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk )**

**Oleh:**

**HANIFAH PUSPA HATI**

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan permasalahan serius yang berdampak luas terhadap aspek hukum, kesehatan masyarakat, dan sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan rehabilitasi medis dan sosial sebagai mekanisme utama penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, praktik peradilan pidana masih didominasi oleh pendekatan represif melalui penjatuhan pidana penjara. Pendekatan tersebut tidak hanya menimbulkan overcrowding di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga memperbesar risiko kekambuhan dan menghambat proses reintegrasi sosial pengguna narkoba. Yang menjadi permasalahan dari skripsi ini adalah bagaimanakah implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba, dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-empiris dengan tujuan untuk menganalisis implementasi rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan bagi pengguna narkoba. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, asas dan doktrin hukum, serta yurisprudensi yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan melalui pengumpulan data lapangan berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap aparat penegak hukum serta pihak terkait guna memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan rehabilitasi dalam praktik peradilan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif rehabilitasi sebagai alternatif pemidanaan telah memiliki dasar hukum yang kuat dan jelas. Namun, dalam

***Hanifah Puspa Hati***

praktiknya pelaksanaan rehabilitasi belum berjalan secara efektif dan konsisten. Hambatan yang ditemukan antara lain tidak optimalnya pelaksanaan asesmen terpadu, lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas rehabilitasi, serta masih dominannya paradigma represif aparat penegak hukum. Putusan Nomor 1217/Pid.Sus/2024/PN Tanjung Karang menjadi contoh konkret bahwa meskipun syarat rehabilitasi terpenuhi, pemidanaan penjara tetap menjadi pilihan utama.

Saran dalam penelitian ini merekomendasikan penguatan kewajiban asesmen terpadu sejak tahap penangkapan, peningkatan kapasitas dan profesionalitas aparat penegak hukum, serta perubahan paradigma penegakan hukum dari pendekatan represif menuju pendekatan kesehatan berbasis pemulihan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi dan pengawasan lintas lembaga agar rehabilitasi dapat berfungsi secara optimal sebagai alternatif pemidanaan yang efektif, manusiawi, dan berkeadilan bagi pengguna narkoba.

**Kata kunci:** *Rehabilitasi, Narkoba, Pemidanaan.*

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF REHABILITATION IMPLEMENTATION AS AN ALTERNATIVE TO PUNISHMENT FOR DRUG USERS ( Study of Decision Number 1217/Pid.Sus/2024/PN Tjk )**

**By:**

**HANIFAH PUSPA HATI**

*Narcotics abuse in Indonesia is a serious problem that has a wide impact on legal, public health, and social aspects. Although Law Number 35 of 2009 on Narcotics has affirmed medical and social rehabilitation as the main mechanism for handling addicts and victims of narcotics abuse, the practice of criminal justice is still dominated by a repressive approach through the imposition of prison sentences. This approach not only causes overcrowding in correctional institutions, but also increases the risk of recurrence and hinders the social reintegration process of narcotics users. The problem of this thesis is how to implement rehabilitation as an alternative to punishment for drug users, and what factors are obstacles to the implementation of rehabilitation as an alternative punishment for drug users.*

*This study uses a normative-empirical qualitative approach with the aim of analyzing the implementation of rehabilitation as an alternative to punishment for narcotics users. The normative approach is carried out through the study of laws and regulations, legal principles and doctrines, as well as relevant jurisprudence, especially Law Number 35 of 2009, SEMA Number 4 of 2010, and court decisions that are the object of research. Meanwhile, an empirical approach is carried out through the collection of field data in the form of interviews, observations, and documentation of law enforcement officials and related parties in order to obtain a real picture of the application of rehabilitation in criminal justice practice.*

*The results of the study show that normatively rehabilitation as an alternative to punishment has a strong and clear legal basis. However, in practice, the implementation of rehabilitation has not been carried out effectively and consistently. The obstacles found include the non-optimal implementation of integrated assessments, weak coordination between law enforcement agencies,*

**Hanifah Puspa Hati**

*limited human resources and rehabilitation facilities, and the still dominant repressive paradigm of law enforcement officials. Decision Number 1217/Pid.Sus/2024/PN Tanjung Karang is a concrete example that even though the conditions for rehabilitation are met, prison sentence remains the main option.*

*The suggestions in this study recommend strengthening the obligation of integrated assessment from the arrest stage, increasing the capacity and professionalism of law enforcement officials, and changing the paradigm of law enforcement from a repressive approach to a recovery-based approach to health. In addition, it is necessary to strengthen coordination and supervision across institutions so that rehabilitation can function optimally as an effective, humane, and just alternative to punishment for narcotics users.*

**Keywords: Rehabilitation, Narcotics, Criminalization.**